

Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Welly¹, Fatimah²

¹Akuntansi, Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, welly.lht@gmail.com

²Akuntansi, Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, fatimah431@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir baik secara simultan maupun parsial. Sampel pada penelitian ini adalah 66 responden. Penelitian menggunakan teknik analisis uji validitas dan uji reliabilitas, rancangan uji asumsi klasik, rancangan uji regresi linear berganda, koefisien determinasi sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji F statistik untuk pengujian secara simultan serta menggunakan uji t statistik untuk pengujian secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif sebesar 70,670 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010) berpengaruh positif sebesar 4,474 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif sebesar 5,507 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: *penyusunan, pemanfaatan sistem, kualitas laporan keuangan*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 kemudian di revisi dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode. Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Ramli, 2016: 11-12).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di

lingkungan organisasi pemerintah. Menurut PP RI Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan akuntansi daerah menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem informasi akuntansi oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/ lembaga (LKLL). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Ramli, 2016: 128). Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Daniel dan Yohanes (2013) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ni Putu, dkk (2014) yang berjudul pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Jembrana), hasil menunjukkan adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Penelitian Dian (2014) yang berjudul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman, dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman.

Penelitian Susilawati dan Dwi (2014) yang berjudul standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52,0%. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13% namun tidak signifikan. Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74,6%. Penelitian Ali dan Sri (2016) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI, terdapat daftar

kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD tahun 2017 yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, seperti pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, entitas terlambat menyampaikan laporan, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Pada IHPS I tahun 2017 yang dikeluarkan BPK RI terdapat juga daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD tahun 2017 yaitu biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan, telah ditemukan sebanyak 257 permasalahan senilai Rp. 87.448.950.000,00.

Salah satu cara untuk melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan SAP dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan sudah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 untuk 18 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sejauh ini telah banyak kabupaten/kota yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi masih terdapat satu kabupaten yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 Januari 2013. Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir sebagai kabupaten yang baru, masih banyak memiliki kekurangan dalam berbagai aspek yaitu perekonomian, teknologi, pembangunan, sumber daya manusia dan lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan pemerintah daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir salah satunya dalam menyusun laporan keuangan. Berikut hasil opini BPK atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2014 sampai dengan 2017.

Tabel 1
Hasil Opini BPK atas LKPD
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014-2017

Tahun	Hasil Opini BPK
2014	TMP (Tidak Memberikan Pendapat)
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : *bpk.ri.go.id*, 2018

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum maksimal. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan kabupaten yang baru terbentuk. Terdapat permasalahan yang ditemukan BPK RI terhadap kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Beberapa permasalahannya yaitu ditemukan daftar akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP atau tidak didukung dengan bukti yang cukup pada LKPD tahun 2017. Daftar akunya yaitu aset lancar, aset tetap, belanja operasi, dan beban operasi – laporan operasional. Dan pada hasil wawancara, diperoleh bahwa setiap dinas telah mempunyai sistem. Sistem ini disebut sebagai SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Dan setiap dinas telah difasilitasi jaringan internet dari Dinas Kominfo, tetapi masih terdapat kendala sistem dan jaringan internet yang belum ada perbaikan secara rutin. Sehingga apabila terjadi masalah, maka masih menggunakan sistem yang manual.

Permasalahan pada tahun 2014 yang telah mendapat opini TMP yaitu ditemukannya adanya ketidakpatuhan,

kecurangan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu kekurangan kas pada dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga serta dinas tenaga kerja transmigrasi dan sosial belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 402.390.989,00, pengelolaan kas pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tidak sesuai ketentuan, relisasi belanja perjalanan dinas pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.514.610.078,24. Pada tahun 2015 yang telah mendapat opini WDP ditemukannya ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pengelolaan pinjam pakai kendaraan dinas tidak tertib, terdapat kendaraan dinas yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas daerah tahun 2015 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.8.417.500,00.

Pada tahun 2016 yang telah mendapat opini WTP ditemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu penetapan retribusi pelayanan kepelabuhan milik swasta pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika tidak tepat, pemotongan pajak penghasilan atas jasa giro rekening FKTP dinas kesehatan tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas luar daerah pada tiga SKPD sebesar Rp. 35.599.006,00. Pada tahun 2017 mendapat opini WDP ditemukannya ketidakpatuhan yaitu APBD yang diterima lebih dari 1 T tetapi belum terealisasi secara penuh termasuk pada pembangunan jalan, terdapat rancangan kerja anggaran (RKA) di beberapa dinas yang belum dilaporkan, tahun 2017 pencairan dana desa tahapan kedua sebesar 40% belum dilaporkan penggunaannya.

Menurut Kepala Perwakilan BPK Sumsel I Gede Kastawa (Berita Pagi, 31 Maret 2016), pihaknya masih memaklumi jika kabupaten baru seperti kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih mendapat opini tidak wajar karena sumber daya manusia Pemkab seringkali menghadapi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Joko Iman Santosa mengatakan, saat ini jumlah SDM di lingkungan Pemprov Sumsel yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya 179 orang. Lulusan diploma III 159 orang, 9 orang strata I dan II yang tersebar di 36 SKPD dari total 42 SKPD yang ada. Jumlah ini menunjukkan, SDM berlatar belakang Akuntansi masih kurang.

B. KAJIAN TEORI

1. Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010)

Menurut PP RI Nomor No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bambang, dkk, 2017: 53). Penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP. Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Dedi, 2009).

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi da pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar

akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Sesuai amanat Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Keanggotaan KSAP, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009. KSAP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, penyusunan laporan keuangan meliputi:

- a) Penyajian, Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- b) Pengukuran, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.
- c) Pelaporan, Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian dari seperti

yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut PP RI Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan akuntansi daerah menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi (Bambang, dkk, 2017: 157). SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri atas proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun

neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (*general purpose*) (Marja, 2018:180). Sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia/ standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku buku besar pembantu (Bambang, dkk, 2017: 30). Indikator pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan terdiri dari (Modul SIA, Dunia Akuntansi dan Manajemen: 2008):

- 1) Tingkat Kecepatan, Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi, dengan adanya software aplikasi sangat membantu pekerjaan.
- 2) Tingkat Keamanan, Keamanan sistem dapat dikendalikan, dengan

pemeliharaan peralatan secara rutin dan terjadwal.

- 3) Tingkat Efisiensi Biaya, Efisiensi biaya harus diperhitungkan secara tepat dengan pertimbangan tertentu sesuai keputusan yang telah dibuat.
- 4) Tingkat Kualitas Hasil, Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi terintegrasi.

Sistem dan prosedur akuntansi serta penyusunan laporan keuangan harus dikembangkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Bambang, dkk, 2017: 157). Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan harus dipastikan tidak ada pertentangan dengan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi berikut ini (Bambang, dkk, 2017: 30): Prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan Prosedur akuntansi selain kas.

3. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Berhubung laporan

keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan terutama digunakan mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- 1) Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksikan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 2) Andal, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian

yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

- 3) Dapat Dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- 4) Dapat Dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk

mempelajari informasi yang dimaksud.

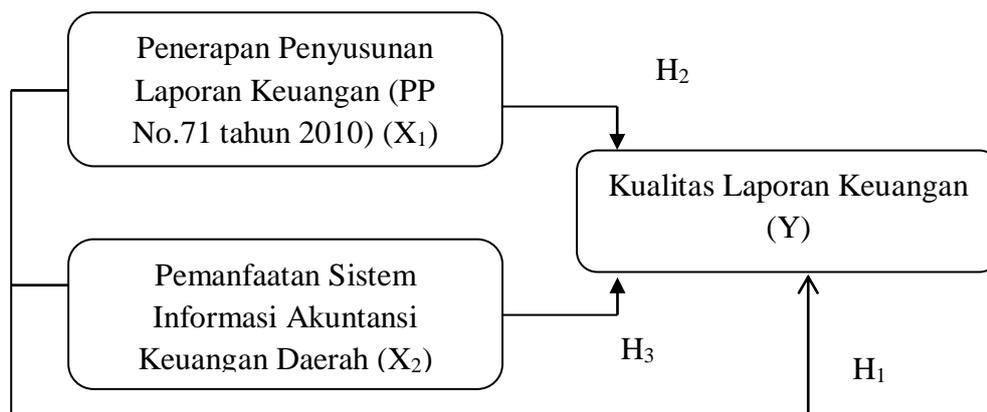
Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

suatu entitas laporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Bambang, dkk, 2017: 41).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan uraian yang telah dibahas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂ = Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₃ = Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen yaitu penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Adapun objek penelitian ini adalah dinas-dinas yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian terdiri dari:

1. Kualitas laporan keuangan (Y) diartikan sebagai laporan keuangan pemerintah daerah yang telah memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan informasi

- yang berguna dalam hal pengambilan keputusan dengan indikator; relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X_1) diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar atau aturan yang berlaku, dengan indikator penyajian, pengukuran dan pelaporan.
 3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) diartikan sebagai penerapan serangkaian prosedur dari awal transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah sampai menjadi informasi keuangan yang dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan di pemerintahan daerah dengan indikator, Tingkat kecepatan, Tingkat keamanan, Tingkat efisiensi biaya dan tingkat kualitas hasil.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah keseluruhan sekelompok orang, peristiwa, tempat dan benda atau hal-hal yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Uma, 2017: 53). Populasi dalam penelitian ini adalah dinas-dinas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu kepala subbagian keuangan, bendahara, dan staff/pegawai keuangan disetiap dinas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 66 responden.

E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data (Azuar, dkk 2014: 69), yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dengan pengelola keuangan di dinas-dinas. Kuesioner yaitu dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dokumentasi dengan mengumpulkan data pendukung yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

F. TEHNIK ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2017: 8-9) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Program for Special Science* (SPSS) untuk mengolah data. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*Ordinary Least Square*) merupakan salah satu metode dalam analisis regresi linier berganda, maka dilakukan uji sebagai berikut:

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- 1) Uji Validitas, Duwi (2016: 51) Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi yang signifikan antara item terhadap skor total item. Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item. Atau bisa melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi seperti yang diungkapkan Azwar 1999

(dalam buku Duwi, 2016: 51), yaitu dengan menggunakan batas nilai korelasi 0,30.

- 2) Uji Reliabilitas, Duwi (2016: 60) mengemukakan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach' Alpha*. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-10, 0-30). Untuk penentuan apakah instrumen reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran 1992 (dalam buku Duwi, 2016: 60), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji sebagai berikut:

- 1) Uji Normalitas Residual, Duwi (2016: 109) Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi yaitu dengan analisis grafik (*histogram* dan *normal P-P plot*) dan uji *Kolmogorov-Smirnov*.
- 2) Uji Multikolinearitas, Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai *inflation Factor* (VIF) kurang dari 10,00 dan *Tolerance* lebih dari 0,10 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.
- 3) Uji Heteroskedastisitas, Duwi (2016: 117-133) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual pada satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas dan yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Dengan uji *glejser*, homoskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05.

- 4) Uji Autokorelasi, Duwi (2016: 133) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* dengan kriteria jika : $D_u < d_w < 4 - d_u$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS, berikut persamaan untuk penelitian ini;

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan

X_1 : Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan

X_2 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

β : Koefisien regresi

α : Nilai Konstanta

e : Error

Koefisien Determinasi, Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) HASIL PENELITIAN

➤ **Gambaran Karakteristik Responden**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan di Dinas-Dinas Kabupaten PALI dengan metode penarikan sampel *Purposive Sampling*. Adapun responden penelitian adalah kepala subbagian keuangan,

bendahara, dan staf/pegawai keuangan sebanyak 66 kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner sekaligus melakukan wawancara kepada responden, sehingga semua kuesioner yang disebar dapat kembali dan terisi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden sebagai berikut:

Tabel 2
Gambaran Umum Responden

Uraian		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	26	39,4%
	Wanita	40	60,6%
Umur	20-30 Tahun	28	42,4%
	31-40 Tahun	21	31,8%
	41-50 Tahun	12	18,2%
	>50 Tahun	5	7,57%
Pendidikan Terakhir	-SMA/SMK	9	13,64%
	-D1	-	-
	-D1	-	-
	-D3	9	13,6%
	-S1	46	69,7%
	-S2	2	3%
Jurusan	Akuntansi	31	46,9%
	Ekonomi	6	9%
	Manajemen	7	10,6%
	Perbankan	-	-
	Lain-lain	22	33,3%
Lama Bekerja	< 3 Bulan	2	3%
	<1 Tahun	6	9%
	>1 Tahun	58	87,9%
Jumlah		66	100%

Sumber: Penulis, Data Primer yang diolah, 2019

➤ Gambaran Karakteristik Variabel Kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri dari tiga variabel dengan dua variabel X (bebas) yaitu penerapan penyusunan laporan keuangan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan variabel Y (terikat) kualitas laporan keuangan. Butir pernyataan pada variabel penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X₁) terdiri dari 15 (lima belas) pernyataan yang terbagi atas 3

indikator, indikator penyajian terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator pengukuran terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator pelaporan terdiri dari 5 (lima) pernyataan. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X₂) terdiri dari 20 pernyataan yang terbagi atas 4 (empat) indikator, indikator tingkat kecepatan terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator tingkat keamanan terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator tingkat efisiensi

biaya terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator tingkat kualitas hasil terdiri dari 5 (lima) pernyataan. Variabel kualitas laporan keuangan (Y) terbagi menjadi 4 (empat) indikator dengan 20 pernyataan, indikator relevan terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator andal terdiri dari 5 (lima) pernyataan, indikator dapat dibandingkan terdiri dari 5 (lima) pernyataan, dan indikator dapat dipahami terdiri dari 5 (lima) pernyataan.

Uji Validitas dan Reabilitas

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X_1)

- a. Validitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010)

Adapun hasil uji validitas variabel X penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,288	0,459	Valid
P2	0,288	0,667	Valid
P3	0,288	0,372	Valid
P4	0,288	0,413	Valid
P5	0,288	0,600	Valid
P6	0,288	0,614	Valid
P7	0,288	0,477	Valid
P8	0,288	0,595	Valid
P9	0,288	0,620	Valid
P10	0,288	0,553	Valid
P11	0,288	0,453	Valid
P12	0,288	0,492	Valid
P13	0,288	0,466	Valid
P14	0,288	0,366	Valid
P15	0,288	0,337	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

- b. Reliabilitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010)

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach' Alpha*.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	15

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 diatas *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,722, ini menunjukkan bahwa nilai

alpha cronbach's lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,722 > 0,6$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan

tabel interpretasi korelasi angka 0,722 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

a. Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun hasil uji validitas variabel (X₂) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pernyataan	R _{tabel}	R _{hitung}	Hasil
P1	0,288	0,463	Valid
P2	0,288	0,489	Valid
P3	0,288	0,527	Valid
P4	0,288	0,604	Valid
P5	0,288	0,581	Valid
P6	0,288	0,369	Valid
P7	0,288	0,544	Valid
P8	0,288	0,620	Valid
P9	0,288	0,507	Valid
P10	0,288	0,343	Valid
P11	0,288	0,620	Valid
P12	0,288	0,684	Valid
P13	0,288	0,562	Valid
P14	0,288	0,569	Valid
P15	0,288	0,633	Valid
P16	0,288	0,604	Valid
P17	0,288	0,343	Valid
P18	0,288	0,442	Valid
P19	0,288	0,690	Valid
P20	0,288	0,669	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

b. Reliabilitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun hasil uji reliabilitas variabel (X₂) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	20

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 diatas *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,742, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,742 > 0,6$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interprestasi korelasi angka 0,742 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai sangat baik.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan(Y)

a. Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Adapun hasil uji validitas variabel (Y) Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Pernyataan	R_{tabel}	R_{hitung}	Hasil
P1	0,288	0,595	Valid
P2	0,288	0,507	Valid
P3	0,288	0,586	Valid
P4	0,288	0,379	Valid
P5	0,288	0,510	Valid
P6	0,288	0,717	Valid
P7	0,288	0,705	Valid
P8	0,288	0,472	Valid
P9	0,288	0,479	Valid
P10	0,288	0,536	Valid
P11	0,288	0,666	Valid
P12	0,288	0,799	Valid
P13	0,288	0,757	Valid
P14	0,288	0,480	Valid
P15	0,288	0,656	Valid
P16	0,288	0,498	Valid
P17	0,288	0,481	Valid
P18	0,288	0,541	Valid
P19	0,288	0,388	Valid
P20	0,288	0,367	Valid

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan item-item pernyataan yang telah diuji kevaliditasnya dengan melihat tabel *product moment* di DF untuk r tabel dengan skala 0,05, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut valid atau reliabel. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid atau tidak reliabel. Adapun penjelasan di jelaskan sebagai berikut: $N-K-Y = 66-2-1 = 63$. DF (Distribusi Frekuensi) r_{tabel} 63 adalah 0,288. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} diatas nilai

r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

b. Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Adapun hasil uji reliabilitas variabel (Y) Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	20

Sumber: Data Diolah, 2019

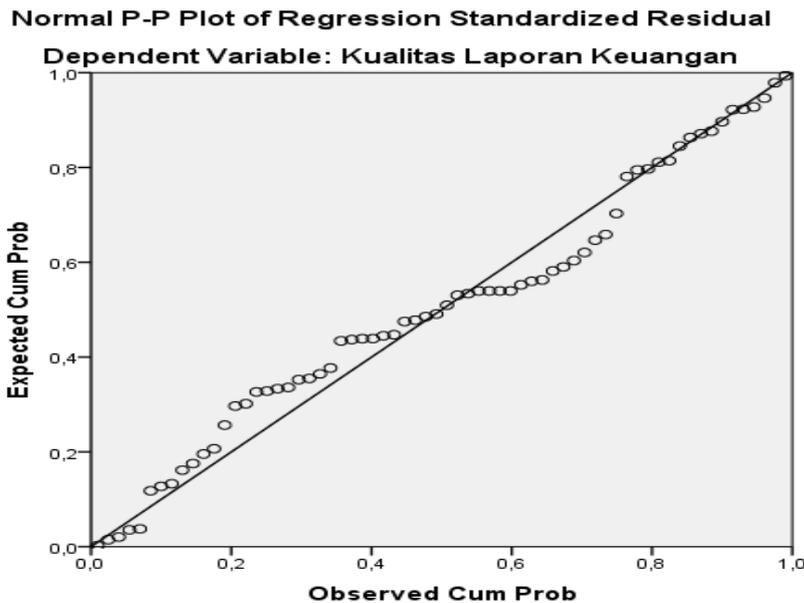
Berdasarkan tabel 8 diatas *Alpha* menunjukkan pada angka sebesar 0,744, ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* lebih dari pada nilai r_{tabel} yaitu sebesar $0,744 > 0,6$ atau juga dapat dijelaskan berdasarkan tabel interprestasi korelasi angka 0,744 menunjukkan bahwa alat instrument yang dipakai dalam penelitian ini sangat baik.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Uji Normalitas dipergunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. normalitas juga bisa dilihat dari grafik *normal P-Plot* yang hasilnya sebagai berikut:

Gambar 2



Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan gambar 2 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dipakai karena memenuhi distribusi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 9
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.280	6.979		.470	.640		
penerapan.penysusunan.laporan.keuangan	.584	.131	.410	4.474	.000	.582	1.719
pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah	.513	.093	.505	5.507	.000	.582	1.719

A. Dependent Variable: kualitas.laporan.keuangan
Sumber: Data Diolah, 2019

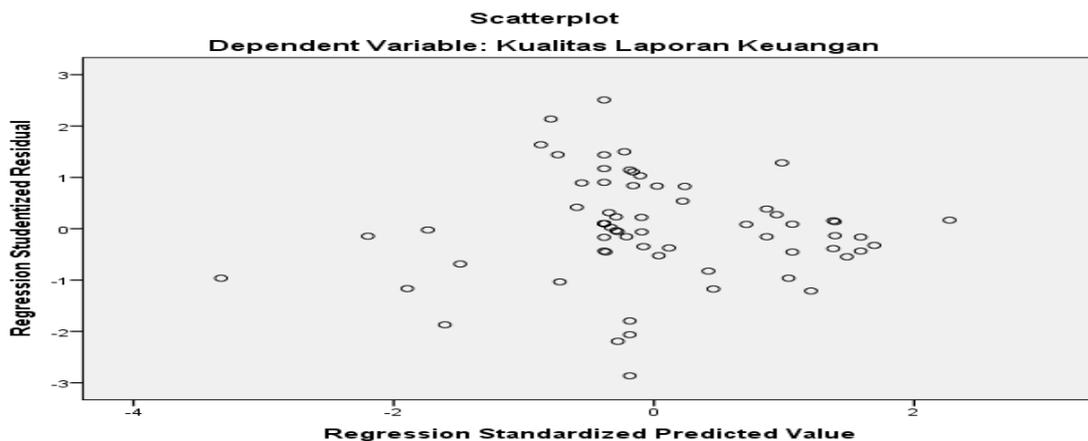
Berdasarkan tabel 9 diatas nilai *tolerance* untuk variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP N0.71 tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah lebih besar dari 0,10. Maka tidak terjadi multikolinearitas dan nilai VIF untuk variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah lebih

kecil dari 10,00. Maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dapat dilihat pada grafik *Scatterplot* berikut ini:

Gambar 3
Uji Heteroskedastitas



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Metode pengujian dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* dibantu dengan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.682	3.775	2.136

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan.Sistem.Informasi.Akuntansi.Keuangan.Daerah, Penerapan.Penyusunan.Laporan.Keuangan

b. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,136, dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* menggunakan derajat kepercayaan 5% dimana jumlah sampel N=66 dan jumlah variabel independen K=2

variabel dependen K=1, maka diperoleh Durbin Low (DL) 1,539 < 2,136 maka tidak ada kesimpulan yang pasti dan Durbin Up (DU) 1,664 < 2,136 maka diterima yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.280	6.979		.470	.640
penerapan.penyusunan.laporan.keuangan	.584	.131	.410	4.474	.000
pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah	.513	.093	.505	5.507	.000

a. Dependent Variable: kualitas.laporan.keuangan

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 11 konstanta untuk persamaan regresi bernilai 3,280 dan nilai koefisien regresinya adalah

0,584 untuk variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan dan 0,513 untuk variabel Pemanfaatan

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

$$Y = 3,280 + 0,584 + 0,513 + e$$

5. Koefisien Determinasi (R Square)

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.682	3.775	2.136

- a. predictors: (constant), pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah, penerapan.penyesunan.laporan.keuangan
b. dependent variable: kualitas.laporan.keuangan

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 12 diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,682 atau 68,2%. Hasil ini berarti 68,2% variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sedangkan 31,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, faktor lain seperti, akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, sarana teknologi informasi dan *good governance*. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun

2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dijadikan model penelitian selanjutnya.

6. Pengujian Hipotesis

- 1) Hasil Pengujian Hipotesis Simultan/Bersama (Uji F)
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah penyajian hipotesis secara bersama (uji F) dengan menggunakan *Analysis of Varians* (ANNOVA). Dengan hasil perhitungan bahwa H_0 ditolak apabila F hitung $>$ F tabel, dan menerima H_a . Hasil perhitungan untuk pengujian ini dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13
Hasil Pengujian Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2014.283	2	1007.142	70.670	.000 ^b
	Residual	897.838	63	14.251		
	Total	2912.121	65			

- a. dependent variable: kualitas.laporan.keuangan
b. predictors: (constant), pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah, penerapan.penyesunan.laporan.keuangan

Sumber: Data Diolah, 2019

Secara simultan penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X_1) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hasil uji F telah diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti sig. F (0,000) < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat. Oleh karena itu semakin baik penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi

akuntansi keuangan daerah semakin baik pula kualitas lapiran keuangan.

2) Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial/Individual (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menjawab permasalahan Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan hasil perhitungan bahwa H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan menerima H_a . Dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Pengujian Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.280	6.979		.470	.640
penerapan.penyusunan.laporan.keuangan	.584	.131	.410	4.474	.000
pemanfaatan.sistem.informasi.akuntansi.keuangan.daerah	.513	.093	.505	5.507	.000

a. dependent variable: kualitas.laporan.keuangan
Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 14 hasil uji hipotesis secara regresi diketahui nilai t_{hitung} 4,474 untuk variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010), dan 5,507 untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan kriteria pengujian ini nilai t_{sig} 0,000 untuk variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010), dan 0,000 untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

a) Pengujian Variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) (X_1)
Variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71

tahun 2010) memiliki nilai hitung $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 4,474 > 1,670. Serta $df = N - K = 2 - K = 1 = 63$ adalah 1,670 maka H_0 ditolak dan untuk t_{sig} 0,000 < 0,05 atau H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

b) Pengujian Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)
Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai hitung $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 5,507 > 1,670.

Serta $df=N=66-K=2-K1=63$ adalah 1,670. Maka H_0 ditolak dan untuk $t_{sig} 0,00 < 0,05$ atau H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2) PEMBAHASAN

a) Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan dari hasil pengujian secara simultan atau uji F bahwa variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil nilai koefisien determinasi serta uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tentang penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi. Kesimpulan hipotesis ini yaitu pengaruh penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dengan penerapan penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Dedi,

2009), dan untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Ahmad, 2008).

Penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat dibutuhkan pada suatu instansi terutama perangkat pemerintah daerah yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maupun untuk mempermudah pegawai untuk menjalankan kegiatan sehari-hari seperti pengurusan pengelolaan keuangan perjalanan dinas pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas. Dala hal ini dapat dilihat bahwa dinas-dinas di kabupaten PALI telah menerapkan SAP dalam menyusun laporan keuangan dan penggunaan sistem dalam pengoperasian untuk kegiatan akan tetapi belum sepenuhnya lengkap, karena masih terdapat kendala sistem dan jaringan internet yang belum ada perbaikan secara rutin, sehingga ini menjadi salah satu penyebab laporan keuangan belum dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan menyebabkan Kabupaten PALI memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Dilihat dari pengaruh kedua variabel, sebaiknya pemerintah melaksanakan kedua variabel tersebut secara bersama guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat pemerintah Kabupaten PALI, dan

dapat meningkatkan kualitas opini yang diberikan BPK dari yang sebelumnya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). ihasilkan akan semakin baik dan memenuhi tujuan yang diinginkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daniel dan Yohanes (2013), yang hasilnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ni Putu, dkk (2014), yang hasilnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dilihat dari hasil penelitian sekarang yang telah dilakukan, bahwa hasil penelitian sekarang sejalan dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b) Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan dari hasil pengujian parsial atau uji t bahwa variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan

standar atau aturan yang berlaku yaitu PP No.71 Tahun 2010. Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena penerapan penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Dedi, 2009), Hasil penelitian sekarang mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel dan Yohanes (2013), yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

c) Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan dari hasil pengujian parsial atau uji t bahwa variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan serangkaian prosedur dari awal transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah sampai menjadi informasi keuangan yang dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi (Ahmad, 2008).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan menolak hasil penelitian Dian (2014), Emilda Ihsanti (2014), R. Nelly dan Adrianus (yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa secara simultan (Uji F) variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial (Uji t) variabel Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Besarnya pengaruh yang diperoleh di *Adjusted R Square* sebesar 0,682 (68,2%). Hasil ini berarti 68,2% variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sedangkan 31,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, faktor lain seperti,

akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, sarana teknologi informasi dan *good governance*.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis berikutnya. Untuk penulis selanjutnya disarankan agar data penelitian yang diperoleh dikembangkan dengan wawancara, karena akan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dan juga dikembangkan lagi dari sudut penelitian yang berbeda dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan selain Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dependen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Fikri Biana Adha Inapty dan Sri Pancawati Martiningsih (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi* 9 (1). Diakses 09 Oktober 2018, dari <file:///E:/Proposalku/Jurnal/3583-8553-2-PB.pdf>.
- As Syifa Nurillah dan Dul Muid. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber

- Daya Manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empris Pada SKPD Kota Depok). *Eprints.undip.ac.id*.
- Azuar Juliandi, dkk (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2018). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. diakses pada Oktober 2018. Jakarta: <https://www.bpk.go.id>.
- Bambang Supriyadi, dkk (2017) *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota tual). *Jurnal STIE Semarang* 5 (3). Diakses 23 Februari 2019, dari <file:///E:/Proposalku/Jurnal/123-1-10.pdf>.
- Dian Irma Diani (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Artikel Ilmiah*. Diakses 10 Oktober 2018, dari <file:///E:/Proposalku/Jurnal/897-1843-1-SM.pdf>.
- Dedi Noerdiawan (2009) *ASP*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia Akuntansi dan Manajemen. 31 Maret 2008. Sistem Informasi Akuntansi. <http://yusufsofyan.blogspot.com>
- Duwi Priyatno (2016) *SPSS Hanbook*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: MediaKom.
- Emilda Ihsanti. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*. Ejournal.unp.ac.id
- Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Keanggotaan KSAP.
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marja Sinurat (2018) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, Dkk (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Jembrana. *E-Journal S1* 2(1). Diakses tanggal 09

- Oktober 2018, dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/ipi 303193.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Akuntansi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Poerwadarminta. W.J.S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Nelly Nur Apandi dan Adrianus Fajar. (2010). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi*. UPI, Volume 2. Nomor 1.
- Ramli Faud (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati dan Dwi (2014). *Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. *Jurnal STAR – Study & Accounting Research* Vol XI, No. 1
- Uma Sekaran (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 Tentang Perbendaharaan Negara.
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan* (Edisi 1). Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Yani Riyanti, dkk (2015). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Internal Audit Terhadap Efektivitas penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Mahkamah Syariah Di Aceh*. *Jurnal Magister Akuntansi* 4(2). Diakses 10 Oktober 2018, dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/4472-8877-1-SM.